

BAB III

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TURKI

SETELAH TAHUN 2014

Dalam bab ini akan membahas mengenai politik luar negeri pada masa Presiden Jokowi, kerjasama dan perjanjian yang sudah dilakukan antara Indonesia-Turki, kerjasama ekonomi Indonesia-Turki, Kerjasama Industri Peralatan Militer Indonesia Turki.

A. Politik Luar Negeri Masa Presiden Jokowi

Politik luar negeri dalam tiga tahun kepemimpinan Presiden Jokowi (2014-2017) dapat dilihat dalam visi misi ‘nawacita’ Presiden Jokowi semasa kampanye Presiden tahun 2014, yaitu membangun Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia yang kompetitif. Dalam mencapai kepentingan nasional tersebut, Presiden Jokowi mulai aktif dalam mempromosikan kemaritiman Indonesia ke banyak negara maupun forum-forum internasional. Selama tiga tahun masa kepemimpinan Jokowi, hampir tidak ada kritik yang berarti dalam politik luar negerinya, kecuali menyangkut isu kemanusiaan Rohingnya di Myanmar yang banyak mendapatkan perhatian publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Haryono, 2017).

Visi ‘nawacita’ dalam politik luar negeri Jokowi diterjemahkan kedalam arah kebijakan menjadikan Indonesia memiliki kekuatan maritim

yang diperhitungkan dunia, serta politik luar negeri Indonesia akan dititikberatkan pada identitas Indonesia sebagai negara kepulauan dalam setiap kesempatan dalam forum-forum bilateral maupun multilateral. Hal ini dibuktikan dengan semakin menguatnya posisi Indonesia dalam setiap forum internasional, Indonesia selalu mendapatkan sorotan banyak negara, memiliki kesempatan yang banyak dalam menyampaikan pendapat, serta sudah banyaknya acara forum Internasional diselenggarakan di Indonesia, sebut saja KTT Asia Pasifik di Bandung tahun 2016.

Diplomasi ekonomi juga menjadi basis kebijakan politik luar negeri Jokowi, hal ini yang kemudian menggeser dominasi isu-isu seperti politik maupun keamanan yang selama ini dilakukan (Haryono, 2017). Berbagai kunjungan luar negeri telah dilakukan oleh Jokowi selama tiga tahun kepemimpinannya dengan mengangkat isu utama terkait kerjasama ekonomi maupun investasi ke Indonesia. Banyak negara yang dikunjungi Jokowi di berbagai kawasan baik itu eropa, asia, amerika, maupun timur tengah, tidak ada dominasi atau kekhususan kerjasama terhadap negara tertentu selama kepemimpinannya. Selain itu, banyaknya kepala negara telah melakukan kunjungannya ke Indonesia untuk melakukan kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia di bidang strategis, hal ini mengindikasikan bahwa posisi Indonesia semakin memiliki daya tawar yang tinggi dalam dunia internasional.

Indonesia juga sangat aktif dalam merespon beberapa peristiwa yang terjadi di regional, kawasan, maupun internasional. Seperti aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina lepas dari blokade negara Israel, memberi bantuan kemanusiaan terhadap negara yang mengalami krisis,

mengirim TNI dalam misi perdamaian ke berbagai negara, serta menolak dengan keras terhadap negara yang mengusik integritas kedaulatan Republik Indonesia di forum PBB.

Selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi, terdapat kritik terkait kebijakan luar negerinya yang menyangkut dua isu, yaitu kemitraan dengan Tiongkok maupun menyangkut masalah Rohingnya di Myanmar (Aivanni, 2017). Pertama menyangkut masalah kemitraan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok, dimana sebagian kalangan menilai bahwa pemerintahan Jokowi terlalu mendekat ke Tiongkok yang menyebabkan banyaknya proyek-proyek didalam negeri di dominasi oleh Tiongkok, serta isu banyaknya warga negara Tiongkok yang datang ke Indonesia baik sebagai professional maupun buruh kasar. Yang kedua adalah menyangkut isu Rohingnya, pemerintahan Jokowi dinilai oleh sebagian kalangan terlalu lambat dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tersebut, hal ini yang mengakibatkan banyaknya pengungsi Rohingnya yang datang ke Indonesia serta negara sekitarnya yang tentunya akan menjadikan beban ekonomi bagi Indonesia. Akan tetapi pemerintahan Jokowi mampu mengambil peran penting dalam penyelesaian kasus tersebut dengan melakukan diplomasi yang intens antara Indonesia dengan Myanmar, hal inilah yang menjadikan Indonesia mendapat berbagai penghargaan yang baik oleh banyak negara maupun PBB.

B. Kerjasama dan Perjanjian Indonesia – Turki

Indonesia dan Turki telah menikmati hubungan bilateral yang baik antar negara, keterikatan sejarah, nilai budaya dan agama telah mengarahkan

kedua negara untuk mengembangkan kerjasama ke berbagai bidang baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun militer.

Seperti yang diketahui, selain kerjasama bilateral yang sudah dilakukan, Indonesia dan Turki juga aktif melakukan kerjasama di forum multilateral, seperti PBB, Organisasi Konferensi Islam, Developing-8, G-20 yang merupakan forum yang terkemuka yang di ikuti oleh Indonesia dan Turki yang masuk kedalam negara dengan ekonomi yang tinggi.

Selain hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah antar negara, kerjasama yang erat juga dilakukan oleh parlemen antar negara. kerjasama dilakukan oleh Majelis Nasional Agung Turki (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) pada tanggal 15 juni 2000 dan masih berlanjut sampai sekarang ini. Kedua parlemen juga menjaga kerjasama yang dekat dalam forum *Inter-Parliamentary Union (IPU)* dan *Asian Parliamentary Assembly (APA)*. Baru – baru ini pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2017, Perwakilan DPR Indonesia melakukan kunjungan ke Parlemen Turki dalam rangka mempererat kerjasama di bidang Energi antar negara (Parlemen, 2017).

Untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dengan Turki dalam bidang ekonomi, Presiden Turki Recep Tayyip erdogan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 30 Juli – 1 Agustus 2015. Kemudian Presiden Erdogan di terima oleh Presiden RI Jokowi di Istana Negara pada tanggal 31 Juli 2015 sore hari. Terdapat sejumlah isu yang di bahas dalam kunjungan Erdogan ke Indonesia, seperti isu-isu ekonomi, industri strategis, dan kerjasama sosial budaya (Artharini, 2015). Hal ini merupakan kunjungan ke

empat Presiden Erdogan ke Indonesia dan pertama dalam kapasitasnya sebagai Presiden Turki. Kunjungan kenegaraan sebelumnya juga dilakukan oleh Erdogan ke Indonesia dengan kapasitasnya sebagai Perdana Menteri Turki. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi. Kunjungan yang dilakukan oleh Erdogan tersebut bertepatan dengan 65 tahun hubungan antara Indonesia – Turki. Dalam kunjungan tersebut, selain membahas kerjasama dengan pemerintah Indonesia, Presiden Erdogan juga akan melakukan kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional, berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta dan bertemu dengan beberapa tokoh agama di Indonesia, serta mengunjungi Musium Nasional (Kominfo, 2015).

Pada tanggal 5 Juli 2017, Presiden Jokowi bertolak menuju Turki dalam rangka kunjungan kenegaraan sekaligus sebagai bentuk balas kunjungan yang telah dilakukan oleh Presiden Erdogan tahun 2015. Pada tanggal 6 Juli, Presiden kemudian bertemu dengan Presiden Erdogan di Istana Negara Turki. Adapun terdapat sejumlah isu yang dibahas dalam kunjungan kenegaraan tersebut, seperti perdagangan dan kesehatan. Kunjungan Presiden Jokowi ke Ankara juga menghasilkan dua nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua negara (Setkab, 2017), yaitu :

1. Pernyataan Bersama para Menteri pada Peluncuran Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Turki (PKEK-IT) atau *Joint Ministerial Statement on the Launch of the Negotiations for Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA)*. Yang ditandatangani oleh

Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perekonomian Republik Turki pada tanggal 6 Juli 2017.

2. Pernyataan Kehendak antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Turki mengenai Kerja Sama Kesehatan atau *Letter of Intent between the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Ministry of Health of the Republic of Turkey on Health Cooperation*. Yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Turki pada Tanggal 6 Juli 2017

Turki merupakan mitra kerjasama Indonesia yang sangat penting. Kerjasama antar kedua negara ini kemudian semakin kuat setelah kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia tahun 2015 dan di balas oleh kunjungan Presiden Jokowi ke Turki tahun 2017. Hal tersebut untuk memperkokoh kerjasama sehingga mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar antar negara. Bagi Turki, Indonesia merupakan negara yang penting karena berlokasi strategis di kawasan Asia Pasifik. Sedangkan bagi Indonesia, negara Turki merupakan negara yang penting bagi Indonesia karena letak negara Turki yang sangat strategis di antara kawasan Asia dan Eropa.

C. Kerjasama Ekonomi Indonesia - Turki

Dimulainya hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Turki dimulai ketika ditandatanganinya Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Teknik pada tahun 1982 yang menjadi payung hubungan kerjasama Indonesia-Turki. Kemudian pada tahun 1993 diadakannya kerjasama di bidang pariwisata antar

kedua negara dalam meningkatkan pendapatan negara di sektor pariwisata. Kerjasama di bidang pariwisata antara Indonesia dengan Turki sangatlah penting karena dampak dari meningkatnya jumlah wisatawan ke negara akan meningkatkan pendapatan ekonomi penduduk lokal maupun penerimaan penghasilan untuk negara.

Selain kerjasama yang baik dibidang pariwisata, Indonesia juga menjalin kerjasama dengan Turki dibidang pertanian. Protokol antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Kerjasama Pertanian telah di selesaikan pada tahun 1995 di Jakarta. Dalam perjanjian tersebut memuat beberapa pokok inti kerjasama, yaitu tentang bertukar pengalaman dan transfer teknologi maupun informasi mengenai pertanian, melakukan penelitian bersama terkait pertanian, serta saling mempromosikan produk unggul hasil pertanian antar kedua negara. Sehingga di harapkan akan mampu meningkatkan nilai pengetahuan, peningkatan teknologi, maupun meningkatnya nilai ekonomi di bidang pertanian antar kedua negara.

Kerjasama Indonesia dengan Turki yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai pembebasan pajak berganda. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan telah ditandatangani pada tahun 1997 di Jakarta. Dimana pada perjanjian tersebut telah membuka peluang kerjasama yang sangat intensif antar kedua negara di bidang ekonomi dan perdagangan.

Indonesia dan Turki juga pertama kalinya mendirikan Komisi Kerjasama Ekonomi (JEC) pada tahun 1982 dan pada tahun yang sama telah menyelenggarakan pertemuan JEC yang pertama. Pada pertemuan JEC yang ke-7 yang diselenggarakan di Ankara pada tanggal 17-18 September 2008, kedua negara sepakat untuk mengadakan pertemuan JEC secara reguler, yakni sekali dalam dua tahun. Pertemuan sidang JEC yang terbaru akan dilakukan dalam waktu dekat, dimana kesepakatan tersebut hasil dari pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Turki di sela-sela pertemuan OKI di tahun 2016 (Kemlu, 2016).

Di samping itu, sektor swasta juga memegang peranan penting ekonomi kedua negara ini. Sektor swasta juga mendirikan *Indonesia-Turkish Business Council* pada tahun 1995 dan menyelenggarakan pertemuan perdanannya di tahun yang sama. Dalam perjalanannya, *Indonesia-Turkish Business Council* sempat mengalami kekosongan hingga pada tahun 2006 diselenggarakannya pertemuan di Jakarta dan untuk ketiga kalinya akan diadakan di Istanbul pada tahun 2008. Pertemuan berikutnya berlangsung pada tahun 2012 di Ankara, dimana pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah untuk meningkatkan perdagangan antar kedua negara dan sebagai ajang untuk mempromosikan investasi di Indonesia (Kemendag, 2012). Adapun sejumlah isu yang menjadi fokus dari JEC ini adalah bidang otomotif, pertahanan, teknologi informasi, energi dan sektor konstruksi.

Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2015, Menko Perekonomian Indonesia Sofyan Djalil menghadiri *Indonesia-Turkey Business Forum* di Jakarta sekaligus menjadi *Keynote Speaker*, selain itu Menteri Perdagangan

Rchmat Gobel dan Ketua Dagang dan Industri (KADIN) Suryo Bambang Sulisto turut hadir dalam pertemuan tersebut serta di pihak Turki juga hadir yakni Menteri Ekonomi Turki H.E Nihat Zeybecki dan President Dewan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Turki (DEIK) Omar Cihad Vardan (Ekon, 2015).

Dalam pelaksanaan *Indonesia-Turkey Business Forum* yang digelar pada 1 Agustus 2015 di Jakarta juga dilengkapi dengan kegiatan *Business Matching* terutama dibidang produk makanan dan pertanian, produk kayu dan kehutanan, mesin, onderdil, mesin *packaging*, mesin manufaktur makanan, mesin tekstil, tambang dan batu alam, bahan konstruksi, garmen, furnitur, produk besi dan baja, perhiasan hingga otomotif. Menko Perekonomian yakin kerjasama antara Turki-Indonesia memiliki potensi dan kesempatan besar bagi ekonomi kedua negara kedepannya. Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto dengan Ketua DEIK Turki, Omer Cihad Vardan melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk meningkatkan kerjasama perdagangan, investasi dan teknologiantara kedua belah pihak (Ekon, 2015)

Diketahui bahwa nilai perdagangan Indonesia-Turki pada tahun 2015 mencapai 1,4 milyar dolar yang merupakan terbesar di Eropa Barat. Sedangkan jumlah investasi Turki di Indonesia mencapai 3,9 juta pada tahun 2015. Adapun di sektor pariwisata, diketahui jumlah wisatawan Turki ke Indonesia mencapai 6.000 orang di tahun 2014 dan jumlah wisatawan Indonesia ke Turki tercatat sekitar 58.000 orang di tahun yang sama (Kemlu, 2016).

Hubungan dagang antar kedua negara juga dipengaruhi oleh impor Turki dari Indonesia. Produk ekspor Turki ke Indonesia yang utama adalah tepung terigu, bahan kimia, peralatan elektrik, produk besi dan baja, katun dan benang, karpet, dan tembakau. Sedangkan ekspor utama Indonesia ke Turki terdiri dari minyak kelapa sawit dan turunannya, karet alam, produk tekstil, kimia, kertas dan karton, tabung televisi, alas kaki, keramik untuk makan dan minum, kayu, mebel, serta peralatan dan perlengkapan elektrik.

Indonesia dan Turki sama-sama menganggap bahwa letak kedua negara sama-sama strategis sehingga mampu saling menguntungkan dan akan mampu menjadi peluang bisnis besar kedepannya. Turki merupakan pintu masuk ke Eropa, Timur Tengah, Asia Barat dan Tengah, sedangkan Indonesia sebagai pintu masuk ke negara-negara Asia Tenggara dan pintu masuk jalur perdagangan Asia Pasifik.

Hubungan kerjasama Indonesia dengan Turki terjalin sangat baik hingga membentuk pertumbuhan positif terhadap ekonomi kedua negara yang kemudian diperkuatnya kerjasama bilateral yang intensif. Di bidang politik dan keamanan, Indonesia dan Turki juga berperan penting dalam menjawab berbagai isu-isu global yang sedang berkembang saat ini khususnya mengenai *good governance*, demokratisasi, serta pemberantasan terorisme. Adapun di bidang kerjasama ekonomi dimana sasaran yang ingin dicapai kedua negara adalah dengan tetap mempertahankan pertumbuhan pasar tradisional maupun non-tradisional serta peningkatan kapasitas kedua negara.

D. Kerjasama Industri Peralatan Militer

Hubungan kerjasama yang cukup baik antara Indonesia dengan Turki selama ini kemudian menyorot sektor strategis nasional, yakni kerjasama industri peralatan militer. Turki merupakan mitra strategis Indonesia sejak tahun 2011 pada saat ditandatanganinya Persetujuan tentang Kerjasama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Turki di tahun 2010. Kerjasama dibidang strategis inilah yang kemudian membuka hubungan Indonesia dengan Turki kearah yang lebih serius.

Diketahui bahwa dalam sejarahnya Turki merupakan negara dengan kekuatan militer yang besar yang mampu menaklukkan beberapa wilayah Eropa kedalam kekuasaan Ottoman. Dengan kekuatan serta kemampuan militer yang di miliki, Ottoman mampu memberi pengaruh terhadap perpolitikan dunia pada saat masa jayanya. Tidak hanya kekuatan militer yang dimiliki, Kerajaan Ottoman pada saat itu juga mampu mengembangkan teknologi persenjataan perang yang lebih maju dari negara lain. Meskipun kini kekuasaan Ottoman telah berganti menjadi Republik Turki yang demokratis, hal ini tidak menurunkan posisi Turki sebagai negara dengan kekuatan militer besar. Turki merupakan salah satu negara anggota *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan masuk sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar kedua setelah Amerika. Untuk itulah yang menjadi salah satu alasan Indonesia mau menjalin kerjasama dengan Turki di bidang industri strategis militer.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki di bidang industri strategis pertahanan adalah untuk memodifikasi tank tempur dan alat komunikasi khusus yang diperuntukkan untuk militer. Tidak hanya Turki, Indonesia juga menjalin kerjasama sejumlah negara terkait pengembangan Alutsista nasional. Diantaranya adalah sudah terjalinnya kerjasama yang baik dengan negara Korea Selatan dalam memproduksi pesawat angkut. Adapun keistimewaan menjalin kerjasama dengan Turki di bidang industri pertahanan adalah adanya *Transfer of Technology (ToT)* yang di tawarkan oleh Turki untuk Indonesia dalam memproduksi sistem pertahanan dan keamanan, lebih lanjut Turki juga siap bekerjasama dalam proses pembuatannya design dari tahap awal hingga menjadi barang jadi. Kerjasama dibidang Pertahanan dengan Turki ini terjadi pada era Presiden SBY dengan kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin yang mewakili delegasi RI dalam kunjungan kerja ke Turki pada tanggal 12 sampai 17 juni 2010. Dalam kunjungan tersebut, Wamenhan jugan didampingi oleh Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI (Mar) Ir Syarif Anwar, M.Bus., M.A dan Dirtekind Ditjen Ranahan Kemhan Laksma TNI Sudi Haryono. Turut hadir pula yang mendampingi Staf Ahli Kepresidenan bidang Pangan dan Energi Yusuf Gunawan selaku pemimpin delegasi bidang Pangan dan Energi. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk membicarakan hal-hal yang akan menjadi agenda pembicaraan kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Turki pada akhir bulan juni 2010. Selain itu kunjungan juga dilakukan dalam upaya menyelesaikan kesepakatan-

kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Turki yang akan ditandatangani pada saat kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Turki.

Adapun topik pembahasan dalam kerjasama industri pertahanan kedua negara adalah membicarakan kerjasama dalam meningkatkan pengadaan Alutsista dan Industri Pertahanan Non-Alutsista (IPNAS). Untuk kerjasama Alutsista, yang menjadi fokus utama adalah kerjasama antara PT. PINDAD dan PT Dirgantara Indonesia (DI) dengan industri pertahanan Turki (FNSS). Sedangkan kerjasama pertahanan Non-Alutsista adalah produksi Non-Alutsista nasional yang selama ini telah mengekspor produk-produknya berupa alat perlengkapan militer ke berbagai negara seperti pakaian militer, sepatu, ikat pinggang, *webbing set* atau jaring samaran, tenda serta berbagai macam produk perlengkapan perorangan lainnya.

Perjanjian kerjasama industri pertahanan yang sudah ditandatangani oleh kedua negara, kemudian diperkuat lagi dengan adanya UU No.19 Tahun 2014 tanggal 7 Agustus 2014 Lembaran Negara No.186 Tambahan Lembaran Negara No.5572 yang disahkan oleh DPR. Hal ini tentunya akan memperkuat kerjasama sektor pertahanan dengan negara mitra, meskipun telah terjadinya pergantian kepala negara serta untuk melindungi kekuatan strategis nasional agar tidak disalah gunakan oleh pihak negara mitra. Setelah disahkannya UU tersebut, barulah kemudian dimulainya pengembangan produk sektor pertahanan antara Indonesia dengan Turki.

Perjanjian yang dimulai pada tahun 2010 itu kemudian mempunyai 3 tahap proses dalam pengembangan produk tank medium sesuai dengan ruang

lingkup kerjasama, yaitu tahap proses desain, proses prototyping dan proses produksi (Pindad, 2016). Desain tank medium di klaim oleh Pindad merupakan produk tank yang tidak akan ditemukan dimanapun di dunia. Tank medium yang dikembangkan oleh Pindad hasil kerjasama dengan FNSS Turki akan mampu melengkapi sistem pertahanan nasional yang sesuai dengan kebutuhan strategis nasional.

Program pengembangan bersama yang menghasilkan desain medium tank memiliki kemampuan pertahanan balistik dan anti ancaman ranjau. Selain itu medium tank juga memiliki kemampuan daya gempur yang luas mulai dari perlindungan jarak dekat untuk pasukan infantri hingga pertempuran antar kendaraan tempur, dengan senjata utama meriam dengan kaliber 105 mm yang dapat digunakan untuk meluncurkan peluru kendali yang mampu menambah kemampuan daya gempur. Medium tank ini merupakan produk dengan penciptaan terbaru dengan teknologi yang mumpuni, di desain dengan menyesuaikan kondisi geografis wilayah Indonesia (Wulandari, Alfita, 2016). Sementara itu, untuk produk pertahanan Non-Alutsista yang berada di bawah IPNAS dimana Turki kemudian menyetujui dengan melakukan pembelian produk tersebut ke Indonesia, namun dalam perkembangannya masih diperlukannya pembahasan secara teknik terkait pembelian produk IPNAS oleh Turki.

Telah diketahui pada tanggal 5 juli 2017, Presiden Jokowi telah bertolak menuju Turki. Dalam pembicaraan Presiden Jokowi dengan Presiden Erdogan juga membahas terkait perlunya meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dengan Turki dengan harapan bahwa akan

terciptanya produk-produk baru dalam melengkapi Alutsista baik Indonesia maupun Turki. Komitmen kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua pemerintahan dalam mengembangkan Alutsista sampai sekarang ini telah mampu memberikan nilai positif hubungan kedua negara.

Dengan dikembangkannya industri pertahanan nasional ini diharapkan akan mampu membawa Indonesia terhadap kemandirian industri Alutsista sesuai dengan kebutuhan nasional, mampu meningkatkan nilai ekonomi dengan menjual hasil produksi Alutsista ke berbagai negara yang membutuhkan, serta Indonesia mampu membuktikan diri sebagai negara yang kuat dan disegani.

Gambar 3 1

Presiden Jokowi dan Presiden Turki Erdogan di Istana Merdeka

